

**ANALISIS PENGARUH AKSES KEUANGAN *DIGITAL P2P LENDING*,
PENDIDIKAN, PENGANGGURAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA**

Skripsi

Oleh:

Nama : Dzikri Badaruzaman Al Haq

NPM : 2111021034



**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

**ANALISIS PENGARUH AKSES KEUANGAN *DIGITAL P2P LENDING*,
PENDIDIKAN, PENGANGGURAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA**

Oleh

Dzikri Badaruzaman Al Haq

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI**

Pada

**Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH AKSES KEUANGAN *DIGITAL P2P LENDING*, PENDIDIKAN, PENGANGGURAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA

Oleh

DZIKRI BADARUZAMAN AL HAQ

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending*, Pendidikan, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel. Dalam penelitian ini digunakan data sekunder dari 34 provinsi di Indonesia selama periode tahun 2020 sampai dengan 2024. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Fintech P2P Lending* berpengaruh negatif signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia, Pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia, Pengangguran berpengaruh negatif signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia, dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia, ceteris paribus. Secara bersama-sama, *Fintech P2P Lending*, Pendidikan, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia periode tahun 2020–2024, ceteris paribus.

**Kata kunci: Ketimpangan Pendapatan, P2P Lending, Pendidikan,
Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Regresi Data Panel.**

ABSTRACT

THE IMPACT OF DIGITAL FINANCIAL ACCESS P2P LENDING, EDUCATION, UNEMPLOYMENT, AND ECONOMIC GROWTH ON INCOME INEQUALITY IN INDONESIA

By

DZIKRI BADARUZAMAN AL HAQ

This study aims to analyze the effect of Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending, Education, Unemployment, and Economic Growth on Income Inequality in Indonesia. This research employs a panel data regression method. The study uses secondary data from 34 provinces in Indonesia during the period from 2020 to 2023. The results show that Fintech P2P Lending has a significantly negative effect on income inequality in Indonesia, Education has a significantly negative effect on income inequality in Indonesia, Unemployment has a significantly positive effect on income inequality in Indonesia, and Economic Growth has a negatively insignificant effect on income inequality in Indonesia, ceteris paribus. Simultaneously, Fintech P2P Lending, Education, Unemployment, and Economic Growth have a significant effect on income inequality in Indonesia during the 2020–2024 period, ceteris paribus.

Keywords: Income Inequality, P2P Lending, Education, Unemployment, Economic Growth, The Panel Data Regression.

Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Akses Keuangan Digital
P2P Lending, Pendidikan, Pengangguran dan
Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan
Pendapatan di Indonesia

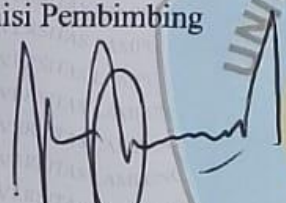
Nama Mahasiswa : Deikri Badaruzaman Al Haq

Nomor Pokok Mahasiswa : 2111021034

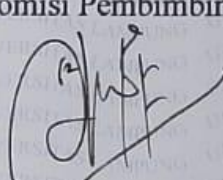
Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Komisi Pembimbing

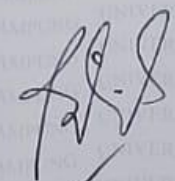

Thomas Andrian, S.E., M.Si.
NIP 197805312005011004

Komisi Pembimbing


Dian Fajarini, S.E., M.E.
NIP 199504252022032015

MENGETAHUI

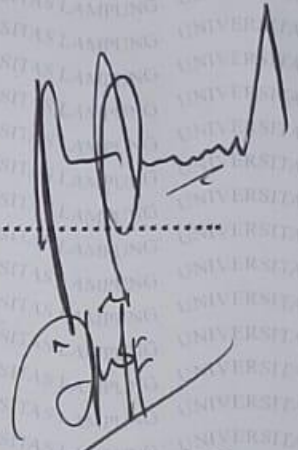
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan


Dr. Arivina Ratih Yulihar T., S.E., M.M.
NIP 198007052006042002

MENGESAHKAN

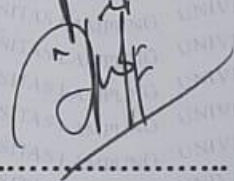
1. Tim Penguji
Ketua

: **Thomas Andrian, S.E., M.Si.**



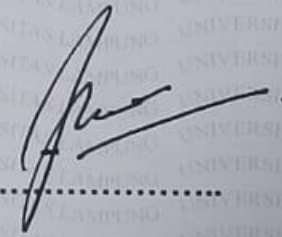
Penguji I

: **Dian Fajarini, S.E., M.E.**



Penguji II

: **Imam Awaludin, S.E., M.E.**



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.

NIP 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **24 Juni 2025**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dzikri Badaruzaman Al Haq

NPM : 2111021034

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Pengaruh Akses Keuangan *Digital P2P Lending*, Pendidikan, Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia” adalah hasil karya saya sendiri, dan dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan dari orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat pemikiran dari peneliti lain tanpa pengakuan peneliti aslinya. Apabila terdapat hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, sepenuhnya tanggung jawab ada pada penyusun.

Bandar Lampung, 24 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,



Dzikri Badaruzaman Al Haq
NPM. 2111021034

RIWAYAT HIDUP



Dzikri Badaruzaman Al Haq lahir di Bandar Jaya pada tanggal 4 Oktober 2003. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Wahyudin dan Ibu Susilawati. Pendidikan dasar ditempuh di Madrasah Ibtidaiyah (MI) YPI Umbul Bandung pada tahun 2009–2015, kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah (MTs) YPI Umbul Bandung pada tahun 2015–2018, dan menyelesaikan pendidikan menengah atas di Madrasah Aliyah (MA) YPI Katibung pada tahun 2018–2021.

Pada tahun 2021, penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung. Selama menjalani masa perkuliahan, penulis aktif dalam berbagai kegiatan organisasi, pelatihan, dan kompetisi. Pada tahun 2022, penulis bergabung sebagai staf di Badan Usaha Mandiri ROIS FEB Unila, serta terlibat dalam kepanitiaan kegiatan Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMEPA). Di tahun 2023, penulis dipercaya menjadi presidium divisi *Skill Development* dalam *Economic English Club* (EEC) FEB Unila.

Pada semester awal tahun 2024, penulis mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Studi Independen di PT Revolusi Cita Edukasi (RevoU), dengan fokus pembelajaran pada bidang data analytics. Pada Juli 2024, penulis dipercaya sebagai Koordinator Lomba Business Plan dalam kegiatan Temu Ilmiah Regional (TEMILREG) Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) Wilayah Sumatera Bagian Selatan. Di tahun yang sama, penulis aktif mengikuti berbagai kompetisi business plan tingkat nasional dan berhasil meraih beberapa prestasi sebagai juara. Penulis juga telah menyelesaikan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2024 di Desa Adi Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan.

MOTTO

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ

“Janganlah Kamu berputus asa dari rahmat Allah.”

(Q.S Az-Zumar : 53)

“Saat kamu terlalu bekerja keras dunia akan terpaksa membuka jalannya. Kamu tidak tahu suatu hal benar-benar bisa terjadi sebelum kamu benar-benar mencobanya”

(Elizabet Murray)

“Alam semesta tak pernah terburu-buru tapi semuanya tercapai. “

(Marcus Aurelius)

“Berani mengubah yang bisa aku ubah, kuat menerima yang tak bisa aku ubah, dan bijaksana memahami perbedaannya.”

(Dzikri Badaruzaman Al Haq)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alam, puji syukur kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan hidayah yang telah diberikan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam juga kupanjatkan bagi suri tauladanku Nabi Muhammad S.A.W. Dengan kerendahan hati, ku persembahkan Karya Tulis ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta,

Bapak Wahyudin dan Ibu Susilawati, atas segala doa, kasih sayang, perjuangan, dan pengorbanan yang tak pernah berhenti mengalir dalam setiap langkahku.

Seluruh dosen dan staf pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lampung,

yang telah menjadi bagian dari proses tumbuh dan belajarku selama menempuh pendidikan tinggi.

Sahabat dan rekan seperjuangan,

yang telah memberikan dukungan, semangat, dan tawa dalam setiap perjuangan di bangku kuliah.

Untuk diriku sendiri di masa lalu dan masa depan,

yang telah bertahan, belajar, dan berjuang demi impian dan cita-cita. Semoga skripsi ini menjadi langkah kecil yang berarti dalam perjalanan panjang pengabdian ilmu dan kehidupan.

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil 'Alamin.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, hidayah, serta kekuatan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: "**Analisis Pengaruh Akses Keuangan Digital P2P Lending, Pendidikan, Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia**". Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan seluruh umat, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada::

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung;
2. Ibu Dr. Arivina Ratih Yulihar Taher, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah banyak memberikan masukan dan motivasi bagi penulis selama masa perkuliahan;
3. Ibu Zulfa Emalia, S.E., M.Sc., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah banyak membantu selama proses perkuliahan hingga kelulusan.

4. Bapak Thomas Andrian, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing satu yang telah meluangkan waktu, memberikan semangat, arahan, dan motivasi dalam penulisan skripsi ini;
5. Ibu Dian Fajarini, S.E., M.E. selaku Dosen Pembimbing dua yang telah meluangkan waktu, memberikan semangat, arahan, dan motivasi dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Imam Awaludin, S.E., M.E., selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberikan masukan, kritik dan saran yang sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Arif Darmawan, S.E., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak masukan dan arahan kepada penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini.
8. Seluruh dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah banyak memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Seluruh Staf/Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membantu selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
10. Bang Elvi Sukendri, S.E., M.Si. selaku Admin Jurusan yang telah membantu dalam mengurus segala keperluan administrasi selama proses kelulusan.
11. Terkhusus Kedua orang tua tercinta, Bapak Wahyudin dan Ibu Susilawati, Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah putus siang dan malam. Terima kasih atas peluh yang jatuh diam-diam demi pendidikan anakmu. Bapak dan Ibu adalah sosok yang paling ikhlas, yang selalu berdiri di barisan paling depan ketika penulis terjatuh, dan diam-diam menyeka air mata saat penulis merasa menyerah. Keteguhan kalian menjadi pondasi dari semangat penulis. Kata-kata nasihat dari Bapak, dan kelembutan serta doa tulus dari Ibu, menjadi penuntun di setiap langkah panjang dan melelahkan ini. Tidak ada pencapaian apapun yang lebih membanggakan daripada bisa membuat kalian tersenyum bahagia. Semoga Allah SWT membalas segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah diberikan dengan sebaik-baik balasan

12. Adiku tersayang, Dion Muammar Bilhaq, yang tingkah polosnya menjadi penghibur dan penyemangat kepada Penulis. Terima kasih atas segala dukungannya kepada Penulis, semoga kelak dapat menjadi orang yang sukses dan memberikan manfaat dikemudian hari.
13. Kakakku yang selalu ku kagumi, Reyvaldin Julian Fairulhaq, terima kasih atas segala dukungan, bantuan dan telah menjadi sosok yang sangat menginspirasi untuk penulis. Semoga engkau dan keluarga kecil mu selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah SWT.
14. Untuk keluarga besar Suningsih–Rajidin dan keluarga besar Kartini-Salam, terima kasih atas kasih sayang dan kehangatan yang selalu menyertai langkah hidup ini. Kepada kakek dan nenek, bibi dan paman, sepupu, serta seluruh anggota keluarga tercinta — terima kasih telah menjadi tempat berlindung yang memberi rasa aman, dimiliki, dan dicintai tanpa syarat. Menjadi bagian dari keluarga besar ini adalah kebahagiaan tersendiri, yang membentuk diri ini menjadi pribadi yang kuat dan bersyukur. Untuk anggota keluarga yang telah mendahului kami, semoga Allah SWT melapangkan tempat peristirahatan kalian, mengampuni segala khilaf, dan menjadikan kebaikan kalian sebagai cahaya bagi keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih telah menjadi bagian dari kisah hidup ini, dengan segala doa, dukungan, dan kebersamaan yang tak ternilai.
15. Untuk sahabat-sahabat terbaik (Kampung Baru Family): Wahyu, Anggi, Yoga, Maul, Firman, Taufiq, Yasidik — Terima kasih telah menjadi tempat berbagi tawa, letih, dan cerita selama masa perkuliahan. Bersama kalian, hari-hari terasa lebih ringan, meski beban tak pernah benar-benar hilang. Terima kasih atas canda yang menghibur di tengah tekanan, nasihat yang datang tanpa diminta, dan kehadiran yang tak pernah absen di saat-saat paling dibutuhkan. Persahabatan kita bukan sekadar pertemanan biasa, melainkan ikatan yang tumbuh dari saling percaya, saling menertawakan kegagalan, dan saling mendorong untuk terus maju.
16. Teman-teman di presidium EEC 2023 (Xabiru), terima kasih atas setiap momen, tantangan, dan tawa yang kita bagi sepanjang satu periode kepengurusan. Terima kasih telah saling menopang di kala lelah, saling memberi ruang untuk berkembang, dan saling percaya dalam mengambil peran. Pengalaman ini akan selalu aku kenang sebagai salah satu fase belajar terbaik dalam hidupku.

17. Untuk teman-teman masa SMA yang hingga kini masih setia menjaga hangatnya persahabatan —Kiki, Zain, Anis, Dita, dan Ropik —terima kasih atas kebersamaan yang tak luntur meski waktu terus berjalan dan jarak memisahkan langkah kita. Kita mungkin tak lagi duduk di bangku yang sama, tak setiap hari bertukar cerita, namun tawa itu tetap hidup saat kita berkumpul kembali — seolah tak pernah ada jeda. Terima kasih telah menjadi bagian dari masa yang penuh warna, dan tetap hadir sebagai teman sejati dalam perjalanan dewasa ini. Semoga kebersamaan kecil kita tetap terjaga, dan setiap pertemuan selalu membawa rasa pulang.
18. Untuk seluruh teman-teman seperjalanan selama masa perkuliahan, yang pernah hadir dalam berbagai ruang dan waktu — di dalam kelas, rapat kepanitiaan, forum lomba, program KKN, hingga sesi daring studi independen — terima kasih atas perjumpaan, percakapan, dan kebersamaan yang mungkin singkat, tapi bermakna. Kita mungkin hanya bertemu satu-dua kali, mungkin hanya saling tukar pesan, atau mungkin pernah terlibat dalam proyek yang penuh deadline — namun semua itu adalah bagian dari mozaik perjalanan yang tak bisa aku lalui sendirian. Namamu mungkin tak bisa kutulis satu per satu, tapi kebaikan, semangat, dan kerja sama yang pernah kita bangun akan selalu aku kenang dengan rasa syukur. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita ini — yang walau sebentar, tetap abadi dalam ingatan.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Teori Distribusi Pendapatan Neoklasik	13
2.1.2 Teori Human Capital	15
2.1.3 Ketimpangan Pendapatan	16
2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi dan Hipotesis U-Terbalik Kuznet	19
2.1.5 <i>Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending</i>	20
2.1.6 Pengangguran dan Distribusi Pendapatan	21
2.2 Tinjauan Empiris	23
2.3 Kerangka Berpikir	26
2.4 Hipotesis	28

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data	29
3.2 Definisi Operasional Variabel	29
3.2.1 Ketimpangan Pendapatan	30
3.2.2 <i>Fintech Peer-to-Peer Lending</i>	30
3.2.3 Pendidikan	30
3.2.4 Pengangguran	30
3.2.5 Pertumbuhan Ekonomi (X4)	31

3.3 Metode Analisis Data	31
3.4.1 Analisis Regresi Data Panel	31
3.4.2 Pemilihan Model Data Panel.....	32
3.4.3 Common Effect Model (CEM)	32
3.4.4 Fixed Effect Model (FEM).....	32
3.4.5 Random Effect Model (REM).....	33
3.4.6 Uji Chow	33
3.4.7 Uji Hausman	34
3.4.8 Uji Lagrange Multiplier (LM).....	34
3.5 Uji Asumsi Klasik	35
3.5.1 Uji Autokorelasi	35
3.5.2 Uji Heteroskedastisitas.....	35
3.5.3 Uji Normalitas.....	35
3.5.4 Deteksi Multikolinearitas	36
3.6 Pengujian Hipotesis	36
3.6.1 Uji t-statistik (Uji Parsial)	36
3.6.2 Uji F-statistik	37
3.7 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
3.4 Statistik Deskriptif	39
3.5 Pengujian Spesifikasi Model	40
3.5.1 Uji Chow	41
3.5.2 Uji Hausman	42
4.3 Uji Asumsi Klasik	42
4.3.1 Uji Normalitas.....	42
4.3.2 Deteksi Multikolinearitas.....	43
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas.....	44
4.3.4 Uji Autokorelasi	45
4.4 Hasil Estimasi Regresi Model Data Panel	46
4.5 Uji Hipotesis Statistik.....	48
4.5.1 Uji t-statistik.....	48
4.5.2 Uji F-statistik	49
4.5.3 Penafsiran Koefisien Determinasi (R^2).....	50
4.6 Pembahasan Hasil Penelitian	50
4.6.1 Pengaruh Peer-to-Peer Lending terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia	50

4.6.2 Pengaruh Pendidikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia	52
4.6.3 Pengaruh Pengangguran terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia.....	53
4.6.4 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia	54
4.7 Individual Effect	56
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 3.1 Data dan Sumber data	29
Tabel 4.1 Analisis Statistik Deskriptif.	39
Tabel 4.2 Hasil Uji Chow.....	41
Tabel 4.3 Hasil Uji Hausman	42
Tabel 4.4 Hasil Deteksi Multikolinieritas	44
Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas	44
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi.....	45
Tabel 4.7 Uji Regresi Fixed Effect Model.....	46
Tabel 4.8 Hasil Uji t-Statistik.....	48
Tabel 4.9 Hasil Uji F-Statistik.....	49
Tabel 4.10 Output Individual Effect.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1.1 Penyelenggara Fintech Di Indonesia Tahun 2024	2
Gambar 1.2 Akumulasi Penyaluran Pinjaman Fintech P2P Lending 2020-2024 ...	3
Gambar 1.3 Indeks Gini Indonesia 2003-2024	5
Gambar 1.4 Rata-rata lama Sekolah Menurut Provinsi Tahun 2024.....	7
Gambar 1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2024.....	9
Gambar 1.6 Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia 2020-2024	10
Gambar 2.1 Kurva Lorenz.....	17
Gambar 2.2 Kurva Kuznet	19
Gambar 2.3 Kerangka Berpikir	27
Gambar 4.1 Histogram Normalitas Residuals	43

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel	Halaman
Lampiran 1 Data Variabel	69
Lampiran 2 Hasil Regresi Fixed Effect Model	73
Lampiran 3 Hasil Uji Chow	74
Lampiran 4 Hasil Uji Hausman.....	74
Lampiran 5 Hasil Uji Autokorelasi	74
Lampiran 6 Hasil Uji Multikolinearitas	75
Lampiran 7 Hasil Uji Normalitas	76
Lampiran 8 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	76

BAB I

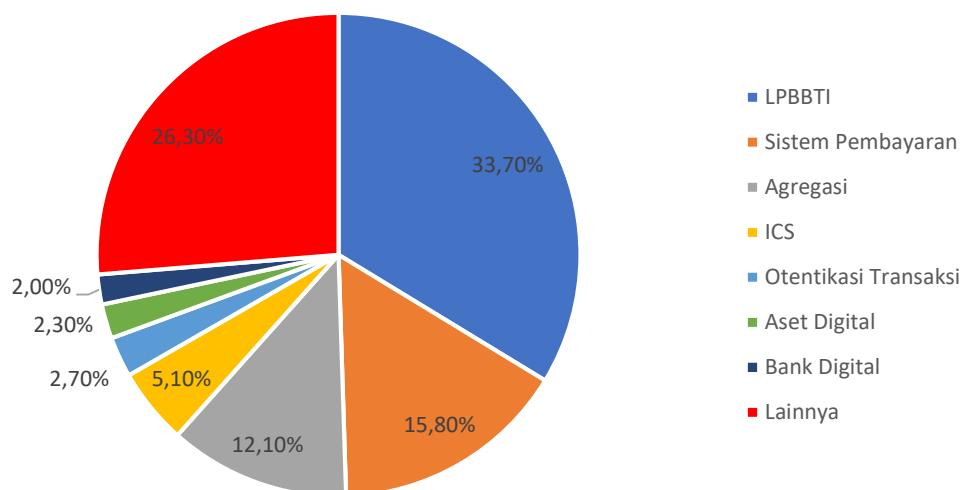
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia mempunyai tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan menjaga stabilitas sistem keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Bank Indonesia, 2020). Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Bank Indonesia juga memiliki peran penting dalam mendorong inklusi keuangan, yaitu menyediakan akses keuangan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang selama ini kurang terjangkau oleh layanan perbankan. Masyarakat *unbanked*, atau mereka yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan formal, sering kali menghadapi berbagai hambatan. Dari sisi penyedia jasa (*supply*), kendala seperti produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat (*design product barrier*) atau kurangnya sarana yang memadai (*channel barrier*) menjadi tantangan utama. Sementara itu, dari sisi masyarakat (*demand*), hambatan seperti mahalnya biaya layanan (*price barrier*) dan kurangnya informasi tentang produk keuangan yang tersedia (*information barrier*) turut berkontribusi terhadap kondisi tersebut.

Keuangan inklusif hadir sebagai solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, dengan memberikan akses keuangan yang lebih luas, sehingga keuangan inklusif mampu menaikkan efisiensi ekonomi dan memperkuat stabilitas sistem keuangan serta mengurangi praktik *shadow banking* atau *irresponsible finance*. Selain itu, inklusi keuangan juga berperan dalam memperdalam pasar keuangan dan membuka potensi pasar baru bagi perbankan. Lebih jauh, inklusi keuangan mendukung peningkatan *Human Development Index* (HDI) Indonesia,

berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta mengurangi kesenjangan (*inequality*) dan *rigiditas low income trap*. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan (Bank Indonesia, 2020). Sebagai bentuk komitmen untuk mendorong keuangan inklusif, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), yang menjadi landasan dalam mewujudkan akses keuangan yang lebih luas sebagai bagian dari agenda nasional. Dewasa ini, akselerasi teknologi dan transformasi digital turut mendukung inklusi keuangan di Indonesia, terutama dengan berkembangnya *financial technology* (*fintech*). *Financial technology* (*fintech*) mengacu pada pemanfaatan teknologi dalam sektor keuangan untuk menciptakan produk, layanan, model bisnis, dan inovasi teknologi baru yang dapat memengaruhi stabilitas moneter, sistem keuangan, serta meningkatkan efisiensi, keamanan, kelancaran, dan keandalan sistem pembayaran. (Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017).



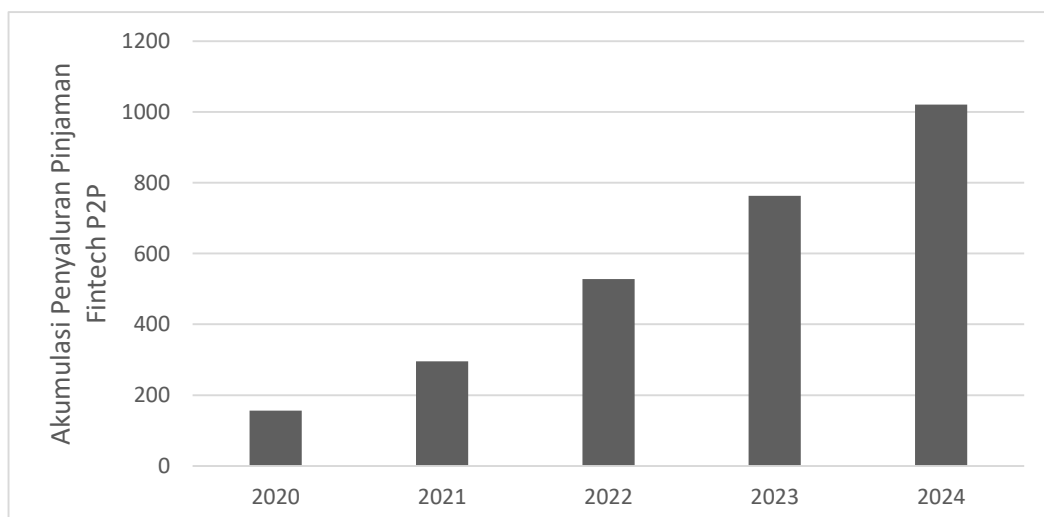
Sumber: Asosiasi Fintech Indonesia (2024)

Gambar 1.1 Penyelenggara Fintech Di Indonesia Tahun 2024

Terdapat berbagai jenis layanan *financial technology* (*fintech*) yang berkembang di Indonesia, di antaranya *fintech* Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), *fintech* sistem pembayaran, *fintech* agregasi, serta jenis

fintech lainnya. Berdasarkan data terkini, sektor *fintech* di Indonesia didominasi oleh LPBBTI, yang lebih dikenal sebagai *Fintech lending* atau *Peer-to-Peer Lending*, dengan pangsa pasar mencapai 33,7%. Dominasi ini mencerminkan tingginya permintaan masyarakat terhadap akses keuangan alternatif, terutama melalui pinjaman online yang menawarkan kemudahan dan efisiensi. Selain itu, sistem pembayaran digital juga memiliki porsi signifikan sebesar 15,8%, menunjukkan peningkatan adopsi teknologi pembayaran di kalangan masyarakat. Layanan agregasi keuangan berkontribusi 12,1%, mencerminkan kebutuhan konsumen akan integrasi data keuangan yang dapat mempermudah pengelolaan finansial masyarakat *unbanked*.

Di sisi lain, layanan seperti bank digital dan aset digital masih memiliki pangsa pasar yang relatif kecil, masing-masing sebesar 2,0% dan 2,3%. Namun, segmen "lainnya" yang mencakup 26,3% menunjukkan adanya diversifikasi layanan *fintech* yang terus berkembang. Hal ini mengindikasikan bahwa inovasi di sektor *fintech* masih terus bergerak maju, terutama dalam menciptakan solusi baru yang belum sepenuhnya terklasifikasi, seperti *insurtech* (teknologi asuransi), *wealthtech* (teknologi pengelolaan kekayaan), dan *regtech* (teknologi regulasi). Diversifikasi ini menunjukkan potensi besar *fintech* dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Gambar 1.2 Akumulasi Penyaluran Pinjaman *Fintech P2P Lending* 2020-2024

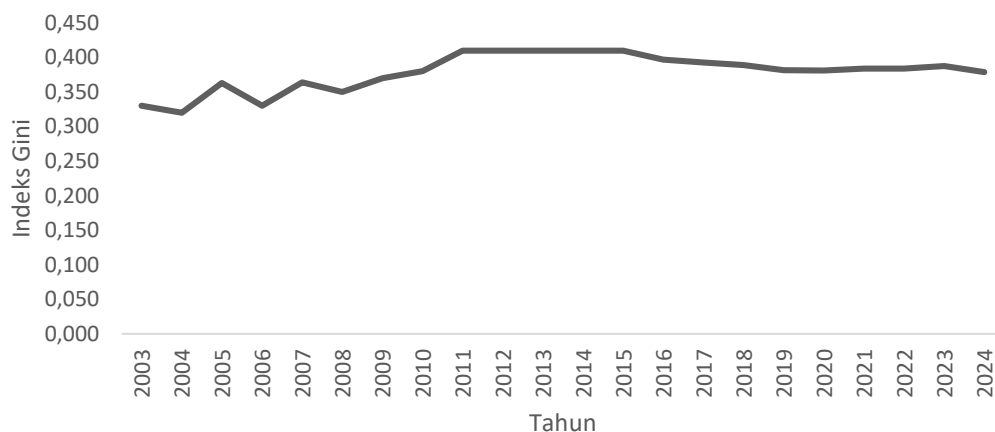
Salah satu inovasi yang menonjol dalam sektor *financial technology* (*fintech*) adalah layanan *peer-to-peer* (*P2P*) *lending*, yang menawarkan solusi pembiayaan alternatif bagi masyarakat yang sulit mengakses layanan keuangan formal. Melalui platform digital, *P2P lending* memberikan kemudahan akses, proses yang efisien, dan biaya yang lebih terjangkau, sehingga menjadi pilihan yang menarik bagi masyarakat, terutama di kalangan unbanked dan underbanked (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Perkembangan ini sejalan dengan upaya Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang bertujuan meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa total akumulasi penyaluran pinjaman melalui *fintech P2P lending* terus meningkat secara signifikan, dari sekitar 150 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi lebih dari 1000 triliun rupiah pada tahun 2024. Pertumbuhan ini mencerminkan semakin tingginya penerimaan masyarakat terhadap layanan *P2P lending* sebagai alternatif pembiayaan.

Inklusi keuangan bertujuan untuk memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat, terutama mereka yang belum terjangkau oleh layanan keuangan formal. Perkembangan layanan *Peer-to-peer Lending* memainkan peran penting dalam mencapai tujuan ini dengan mempermudah masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan layanan pendanaan atau pembiayaan keuangan. Akses yang lebih merata terhadap layanan keuangan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat perekonomian rumah tangga, dan memberi kesempatan bagi lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi yang produktif. Pada akhirnya, peningkatan inklusi keuangan ini akan berkontribusi pada penurunan ketimpangan pendapatan (Sari & Saraswati, 2022).

Demir et al., (2022) menunjukkan bahwa *fintech* memiliki dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap ketimpangan pendapatan, yang dimediasi oleh tingkat inklusi keuangan. Studi ini dilakukan di 140 negara dengan menggunakan data dari Global Findex. Sementara itu, Zhang et al., (2018) juga menemukan bahwa perkembangan *fintech* memberikan pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di China. Dengan adanya *fintech* berpengaruh pada peningkatan pendapatan masyarakat sehingga pada akhirnya menurunkan ketimpangan pendapatan. Lalu menurut studi INDEF & Asosiasi Fintech Indonesia,

(2019) *fintech* lending mampu mengurangi angka ketimpangan (gini ratio) sebesar 0,01 di Indonesia.

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh perekonomian Indonesia. Ketimpangan pendapatan mencerminkan disparitas yang mencolok dalam distribusi pendapatan di masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada perbedaan kualitas hidup (Todaro & Smith, 2020). Ketimpangan pendapatan tidak hanya menghambat pembangunan yang inklusif, tetapi juga meningkatkan risiko instabilitas sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan menjadi prioritas nasional, sebagaimana tercermin dalam tujuan ke-10 Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu mengurangi ketimpangan di dalam dan antarnegara. Ada berbagai indikator yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan di suatu negara. Salah satu indikator utama untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah Indeks Gini.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Gambar 1.3 Indeks Gini Indonesia 2003-2024

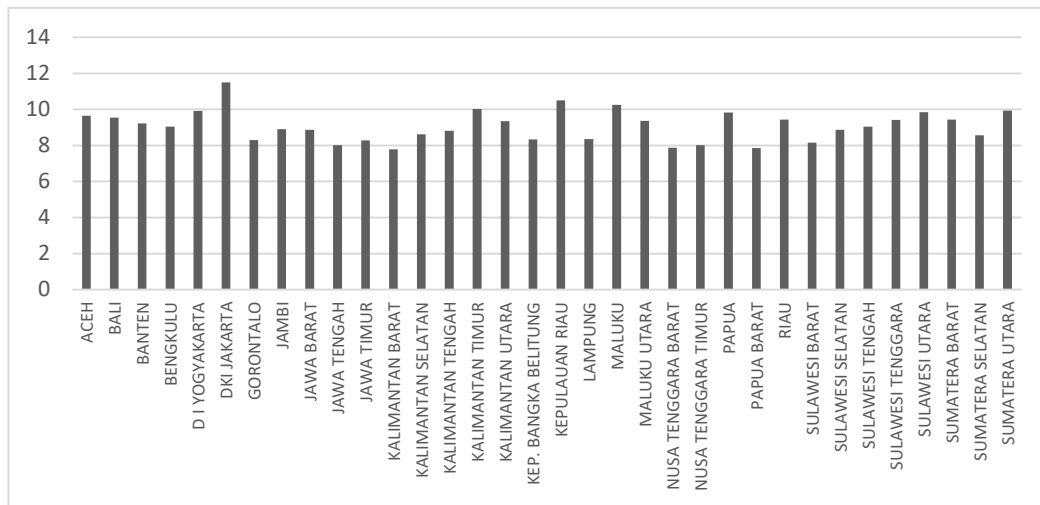
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), indeks gini di Indonesia dalam dua dekade terakhir cenderung stagnan dengan sedikit peningkatan, mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan masih menjadi permasalahan yang signifikan. Kondisi ini memerlukan langkah strategis untuk menguranginya agar tidak menghambat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu

upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani masalah ini adalah meningkatkan inklusi keuangan melalui pemanfaatan teknologi finansial (fintech).

P2P Lending memberikan kemudahan akses kredit bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang sebelumnya sulit mendapatkan pinjaman melalui lembaga keuangan tradisional. Akses ini memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan dana tersebut dalam aktivitas ekonomi yang produktif, seperti pengembangan usaha atau peningkatan kapasitas ekonomi rumah tangga. Dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan individu atau rumah tangga, kesenjangan pendapatan di masyarakat dapat berkurang secara bertahap, sehingga turut berkontribusi dalam mengatasi ketimpangan.

Namun, perlu disadari bahwa perluasan akses keuangan melalui *P2P Lending* saja tentunya tidak cukup untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan. Kemampuan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan peluang ekonomi yang tersedia sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dimiliki. Pendidikan tidak hanya berperan dalam meningkatkan kualitas hidup individu, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang produktif, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan perubahan.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Dalam konteks pembangunan ekonomi, pendidikan dipandang sebagai bentuk investasi dalam modal manusia (human capital). Teori *Human Capital* menyatakan bahwa pendidikan akan meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan pendapatan individu. Oleh karena itu, peningkatan akses dan kualitas pendidikan adalah salah satu faktor kunci dalam menurunkan ketimpangan pendapatan di masyarakat.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Gambar 1.4 Rata-rata lama Sekolah Menurut Provinsi Tahun 2024

Di Indonesia, peningkatan akses pendidikan secara nasional terus berlangsung. Namun, ketimpangan capaian pendidikan antarwilayah masih menjadi tantangan serius. Berdasarkan Visualisasi pada Gambar 1.4 menunjukkan distribusi rata-rata lama sekolah di seluruh provinsi di Indonesia. Terlihat bahwa provinsi seperti Daerah Istimewa Yogyakarta dan DKI Jakarta memiliki rata-rata lama sekolah mendekati 12 tahun, mencerminkan tingkat pendidikan menengah atas. Sementara itu, beberapa provinsi di Indonesia bagian timur seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur masih mencatatkan angka rata-rata lama sekolah di bawah 9 tahun, yang setara dengan jenjang pendidikan dasar hingga awal pendidikan menengah.

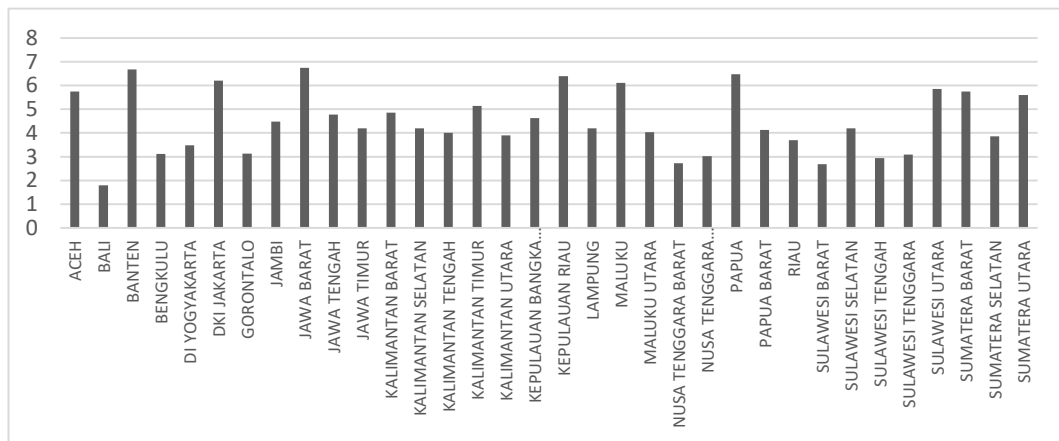
Perbedaan capaian pendidikan ini menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan berkualitas belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Ketimpangan dalam pendidikan berdampak langsung pada ketimpangan dalam kesempatan ekonomi. Individu dengan pendidikan rendah cenderung terbatas dalam mengakses pekerjaan formal yang produktif dan berpenghasilan tinggi. Sebaliknya, mereka lebih rentan bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang tidak menentu. Kondisi ini tidak hanya memperlebar kesenjangan pendapatan antarindividu, tetapi juga memperkuat ketimpangan antarwilayah.

Berdasarkan teori human capital, peningkatan capaian pendidikan suatu populasi akan sejalan dengan peningkatan pendapatan masyarakat secara keseluruhan.

Psacharopoulos dan Patrinos (2004) dalam studinya menunjukkan bahwa setiap tambahan tahun pendidikan formal mempunyai pengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan individu. Bagi negara-negara berkembang yang berhasil memperluas akses pendidikan secara merata cenderung memiliki tingkat ketimpangan pendapatan yang lebih rendah (Todaro & Smith, 2020). Penelitian oleh Hindun et al., (2019) menemukan bahwa pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya, peningkatan tingkat pendidikan penduduk secara rata-rata mampu mempersempit ketimpangan pendapatan.

Dengan demikian, pendidikan memiliki peran strategis dalam mempersempit ketimpangan pendapatan. Ketika akses dan kualitas pendidikan dapat dijamin secara lebih merata, maka peluang untuk mencapai kesejahteraan yang lebih adil dan berkelanjutan akan semakin terbuka.

Selain faktor pendidikan, tingkat ketimpangan pendapatan juga sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar tenaga kerja, khususnya tingkat pengangguran. Pengangguran yang tinggi tidak hanya mencerminkan tidak optimalnya pemanfaatan sumber daya manusia, tetapi juga memperbesar ketimpangan pendapatan karena sebagian besar masyarakat tidak memperoleh sumber penghidupan yang stabil. Menurut International Labour Organization (ILO, 2018), pengangguran adalah situasi di mana individu yang termasuk dalam angkatan kerja tidak mendapatkan pekerjaan meskipun sedang mencari pekerjaan dan tersedia untuk bekerja. pengangguran menyebabkan bagian pendapatan nasional yang dialokasikan kepada tenaga kerja menurun, sehingga meningkatkan konsentrasi pendapatan di kalangan pemilik modal.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Gambar 1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2024

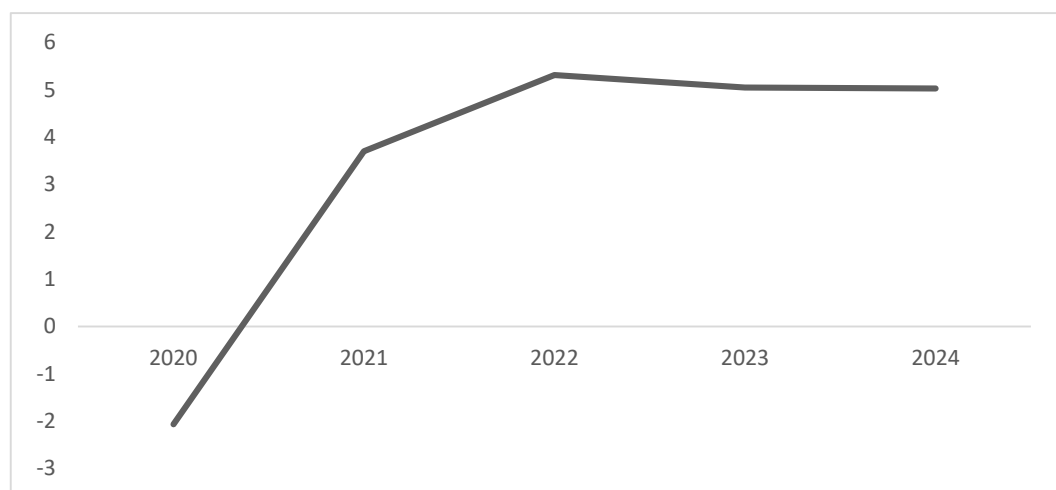
Gambar 1.5 memperlihatkan tingkat pengangguran terbuka di berbagai provinsi di Indonesia pada tahun 2024. Terlihat adanya variasi yang cukup lebar antarprovinsi. Provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi antara lain Banten, DKI Jakarta, dan Sumatera Barat, yang masing-masing mencatatkan TPT di atas 6%. Sebaliknya, provinsi seperti Bali, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat menunjukkan tingkat pengangguran yang lebih rendah, berada di kisaran 3–4%.

Data ini mengindikasikan bahwa daerah-daerah urban atau pusat industri besar seperti DKI Jakarta dan Banten, meskipun memiliki aktivitas ekonomi tinggi, tetapi menghadapi tantangan dalam penyerapan tenaga kerja. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya *mismatch* antara kebutuhan pasar tenaga kerja dan kualifikasi pencari kerja, urbanisasi yang tinggi, serta perubahan struktur industri. Sementara itu, provinsi dengan basis ekonomi agraris atau berbasis sektor informal cenderung menunjukkan tingkat pengangguran terbuka yang lebih rendah, meskipun dengan kualitas pekerjaan yang seringkali masih rendah.

Tingkat pengangguran yang tinggi berpotensi memperbesar ketimpangan pendapatan. Daerah dengan pengangguran tinggi memiliki lebih banyak penduduk yang kehilangan kesempatan memperoleh penghasilan layak, sehingga meningkatkan konsentrasi pendapatan di kelompok yang bekerja atau bermodal, dan memperlebar jurang kesejahteraan. Hindun et al., (2019) menemukan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan

pendapatan di Indonesia. Penelitian oleh Khoirudin & Musta'in (2020) juga menemukan hasil yang sama dimana tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini terjadi karena pengangguran menyebabkan sebagian besar masyarakat tidak memperoleh pendapatan tetap, sehingga pendapatan nasional hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Ketidakmerataan kesempatan kerja tersebut memperbesar jurang kesejahteraan antar kelompok pendapatan dan memperkuat struktur ketimpangan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi juga mempunyai kaitan erat dengan distribusi ketimpangan pendapatan. Menurut Kuznets, (1955), terdapat hubungan non-linear berbentuk kurva U terbalik antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan, yang dikenal dengan *Kuznets Hypothesis*. Pada tahap awal pembangunan, ketimpangan cenderung meningkat karena manfaat pertumbuhan lebih banyak dinikmati oleh kelompok ekonomi atas. Baru pada tahap pembangunan yang lebih matang, ketimpangan mulai menurun ketika manfaat pertumbuhan dapat dinikmati secara lebih luas.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Gambar 1.6 Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia 2020-2024

Grafik Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, ekonomi mengalami kontraksi dengan pertumbuhan negatif sebesar -2,07%, yang kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi

COVID-19 yang menghentikan banyak aktivitas ekonomi. Namun, pada tahun 2021, ekonomi mulai pulih dengan pertumbuhan sebesar 3,7%, menandakan adanya pemulihan yang cukup cepat akibat berbagai kebijakan stimulus dan pelonggaran pembatasan sosial. Tren positif ini terus berlanjut pada tahun 2022, dengan pertumbuhan meningkat menjadi 5,31%, mencerminkan ekspansi ekonomi yang lebih kuat, didorong oleh peningkatan investasi dan konsumsi masyarakat. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi sedikit melambat menjadi 5,05%, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti ketidakpastian ekonomi global atau penyesuaian kebijakan yang lebih ketat. Stabilitas pertumbuhan berlanjut hingga 2024, dengan ekonomi tetap tumbuh pada tingkat 5,03%. Pertumbuhan ekonomi yang kuat diharapkan dapat menciptakan peluang kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong distribusi pendapatan yang lebih merata. Studi yang dilakukan oleh Dwiputra, (2018) & Firdhausy et al., (2023) menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi berkontribusi pada pengurangan ketimpangan pendapatan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bank sentral dan pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Salah satu strategi utama untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui peningkatan inklusi keuangan, yang kini semakin diperkuat dengan pemanfaatan teknologi finansial (*fintech*). Namun demikian, ketimpangan pendapatan tetap menjadi tantangan besar yang dapat menghambat tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Selain perluasan akses keuangan, faktor lain seperti tingkat pendidikan, tingkat pengangguran, dan pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi juga menjadi elemen penting yang harus diperhatikan dalam upaya mengurangi ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif mengenai pengaruh *peer-to-peer lending*, pendidikan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur ilmiah serta menjadi landasan dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam Penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penyaluran pinjaman melalui *peer-to-peer lending* terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah maka didapatkan tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh penyaluran pinjaman *peer-to-peer lending* terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia
2. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai *fintech peer-to-peer lending* terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti empiris terkait dengan pengaruh hubungan antara *fintech peer-to-peer lending* terhadap ketimpangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Distribusi Pendapatan Neoklasik

Teori distribusi pendapatan neoklasik berfokus pada bagaimana pendapatan dalam perekonomian didistribusikan berdasarkan produktivitas marginal dari faktor-faktor produksi. Model dasar dari teori ini menyatakan bahwa setiap individu memperoleh pendapatan sesuai dengan kontribusi produktivitasnya dalam proses produksi. Dalam pandangan neoklasik, pendapatan seseorang berasal dari kepemilikan faktor produksi seperti tenaga kerja atau modal. Setiap faktor produksi akan menerima bagian dari output total sesuai dengan kontribusinya dalam menciptakan nilai tambah (Mankiw, 2019).

Dalam konteks distribusi pendapatan, teori ini menekankan bahwa pasar yang berfungsi secara kompetitif akan menghasilkan distribusi pendapatan yang adil karena setiap individu menerima kompensasi yang setara dengan nilai produktivitas marginalnya. Dengan kata lain, tenaga kerja memperoleh upah berdasarkan tingkat produktivitasnya, sementara pemilik modal menerima imbal hasil dari investasi modalnya. Namun, teori ini juga menyadari bahwa ketimpangan pendapatan dapat terjadi jika terdapat perbedaan dalam kepemilikan faktor produksi atau jika pasar mengalami kegagalan akibat monopoli, asimetri informasi, atau ketidaksempurnaan pasar lainnya. Ketidakseimbangan dalam distribusi faktor produksi dapat menyebabkan sebagian kelompok masyarakat memperoleh pendapatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya, yang pada akhirnya meningkatkan ketimpangan pendapatan (Mankiw, 2019).

Teori neoklasik juga menggunakan fungsi produksi agregat untuk menjelaskan bagaimana faktor produksi berkontribusi terhadap output ekonomi. Fungsi produksi yang umum digunakan dalam teori ini adalah fungsi produksi Cobb-Douglas:

$$Y = AK^{\alpha}L^{1-\alpha}$$

Di mana:

- Y adalah output total,
- A adalah tingkat teknologi,
- K adalah modal,
- L adalah tenaga kerja, dan
- α adalah proporsi pendapatan yang diterima oleh modal sedangkan $(1-\alpha)$ adalah proporsi pendapatan untuk tenaga kerja.

Fungsi produksi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan output bergantung pada akumulasi modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, akses ke modal yang lebih luas dapat meningkatkan kapasitas produksi tenaga kerja, yang pada akhirnya dapat mengurangi ketimpangan pendapatan dengan meningkatkan upah pekerja (Solow, 1956).

P2P lending dapat meningkatkan akses keuangan bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah, sehingga memungkinkan mereka meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Dengan meningkatkan modal yang tersedia bagi usaha kecil dan menengah, individu dalam kelompok ini dapat meningkatkan efisiensi usaha mereka, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Akses ke modal melalui *P2P lending* dan meningkatkan akumulasi modal di sektor usaha kecil dan menengah, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Dengan meningkatnya produktivitas, permintaan terhadap tenaga kerja juga akan meningkat, menyebabkan kenaikan upah bagi pekerja di sektor ini. Seiring waktu, peningkatan upah dan pendapatan dari usaha kecil akan mengurangi ketimpangan antara kelompok ekonomi yang memiliki akses ke modal dengan kelompok yang sebelumnya terpinggirkan dari sistem keuangan konvensional. Dengan kata lain, akses modal yang lebih luas dapat

mempersempit kesenjangan dalam kepemilikan faktor produksi, sehingga distribusi pendapatan menjadi lebih merata.

2.1.2 Teori Human Capital

Teori human capital menekankan bahwa tenaga kerja bukan hanya sekadar faktor produksi, tetapi juga aset yang dapat ditingkatkan melalui investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh Becker (1993), yang berargumen bahwa peningkatan keterampilan dan pengetahuan individu akan berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan, pada akhirnya, pendapatan yang lebih tinggi. Teori ini menyoroti pentingnya modal manusia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata.

Human capital merujuk pada kumpulan keterampilan, pengetahuan, dan kapabilitas individu yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Semakin tinggi kualitas human capital, semakin besar potensi individu dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Pendidikan menjadi salah satu faktor utama dalam pengembangan human capital, karena pendidikan yang lebih tinggi memungkinkan seseorang untuk memperoleh keterampilan yang lebih baik dan lebih kompetitif di pasar tenaga kerja. Dalam konteks distribusi pendapatan, teori human capital menjelaskan bahwa individu dengan tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki akses terhadap pekerjaan dengan upah yang lebih baik dibandingkan mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah (Psacharopoulos & Patrinos, 2004). Oleh karena itu, tingkat pendidikan suatu populasi memiliki hubungan erat dengan tingkat ketimpangan pendapatan di suatu wilayah.

Model ekonomi yang umum digunakan dalam teori ini adalah Persamaan Pendapatan (Mincer, 1974), yang menggambarkan hubungan antara pendidikan, pengalaman kerja, dan pendapatan individu:

$$\ln W = \beta_0 + \beta_1 S + \beta_2 X + \beta_3 X^2 + \varepsilon$$

Di mana:

W adalah upah individu,

S adalah jumlah tahun pendidikan formal,

X adalah pengalaman kerja,

X^2 adalah kuadrat dari pengalaman kerja untuk menangkap efek non-linear,

e adalah faktor kesalahan.

Persamaan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengalaman kerja seseorang, semakin besar pendapatan yang akan diterima. Namun, dampak pengalaman kerja terhadap pendapatan bersifat non-linear, yang berarti peningkatan pengalaman kerja hanya akan meningkatkan pendapatan hingga batas tertentu sebelum akhirnya mengalami diminishing returns. Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan lebih awal memberikan manfaat jangka panjang yang lebih besar dibandingkan pengalaman kerja tanpa pendidikan yang memadai.

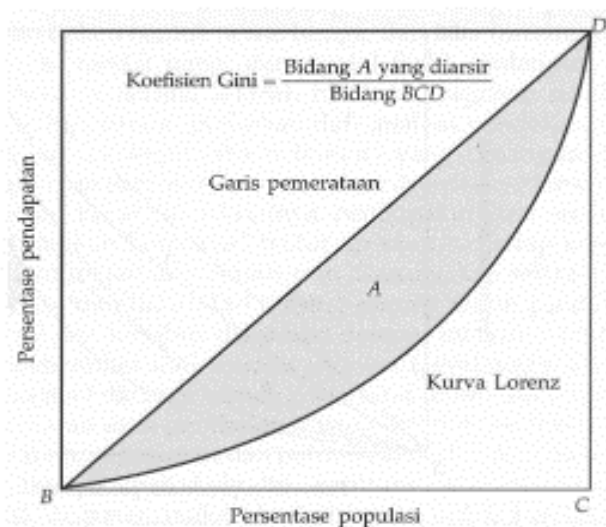
Dalam konteks penelitian ini, teori human capital menjadi dasar konseptual dalam memahami peran pendidikan terhadap distribusi pendapatan di Indonesia. Pendidikan yang lebih tinggi memungkinkan individu untuk meningkatkan keterampilan dan memperoleh pekerjaan dengan upah lebih baik, sehingga mengurangi kesenjangan pendapatan antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah. Variabel pendidikan dalam penelitian ini digunakan sebagai proksi untuk human capital, dengan asumsi bahwa semakin tinggi rata-rata tingkat pendidikan suatu wilayah, semakin kecil ketimpangan pendapatan yang terjadi di wilayah tersebut.

2.1.3 Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan menggambarkan kondisi di mana distribusi pendapatan nasional tidak merata di antara rumah tangga dalam suatu negara (Todaro & Smith, 2020). Sukirno, (2006) mendefinisikan ketimpangan pendapatan sebagai konsep yang membahas distribusi pendapatan di antara individu atau rumah tangga dalam masyarakat. Kuncoro, (2009) mengartikan ketimpangan pendapatan sebagai standar hidup yang berbeda di seluruh masyarakat, yang disebabkan oleh kesenjangan antar wilayah akibat perbedaan dalam faktor produksi dan sumber daya yang tersedia.

Para ekonom menggunakan berbagai metode untuk mengukur ketimpangan pendapatan, dengan salah satu yang paling umum adalah distribusi ukuran pendapatan (*size distribution of income*). Metode ini hanya memperhatikan jumlah pendapatan individu atau rumah tangga tanpa mempertimbangkan asal pendapatan, lokasi, atau jenis pekerjaan. Individu dengan jumlah pendapatan yang sama dikategorikan setara, meskipun cara mereka memperolehnya berbeda. Untuk analisis lebih lanjut, penduduk dikelompokkan berdasarkan tingkat pendapatan, dari yang terendah hingga tertinggi, ke dalam kuintil (seperlima) atau desil (sepersepuluh). Ketimpangan kemudian diukur dengan membandingkan persentase pendapatan yang diterima oleh 40% populasi termiskin dengan 20% populasi terkaya. Ketimpangan dianggap berat jika 40% termiskin menerima kurang dari 12% pendapatan nasional, dan ringan jika mereka memperoleh lebih dari 17% (Todaro & Smith, 2020).

Metode lain yang umum digunakan untuk menganalisis statistik pendapatan individu adalah melalui pembuatan Kurva Lorenz. Kurva Lorenz merupakan representasi grafis yang menggambarkan distribusi pendapatan individu dalam suatu populasi, menunjukkan tingkat ketimpangan dibandingkan dengan distribusi pendapatan yang merata sempurna (Todaro & Smith, 2020). Sumbu horizontal kurva lorenz merepresentasikan persentase kumulatif populasi, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan persentase kumulatif pendapatan nasional.



Sumber: Todaro & Smith (2020), Pembangunan Ekonomi(257). Pearson

Gambar 2.1 Kurva Lorenz

Menurut Todaro & Smith (2020), kurva lorenz menunjukkan hubungan kuantitatif antara persentase kumulatif penduduk dan persentase kumulatif pendapatan yang diterima selama periode tertentu, misalnya satu tahun. Kurva yang semakin mendekati diagonal utama menunjukkan distribusi pendapatan yang semakin merata, sedangkan kurva yang semakin jauh dari diagonal mencerminkan ketimpangan yang semakin besar. Pada kondisi ekstrem, jika seluruh pendapatan hanya diterima oleh satu orang, kurva akan berhimpit dengan sumbu horizontal di bagian bawah dan sumbu vertikal di sebelah kanan. Dalam kenyataannya, kurva Lorenz untuk setiap negara terletak di sebelah kanan diagonal, dengan tingkat ketidakmerataan yang semakin besar ditandai oleh lengkungan yang semakin tajam mendekati sumbu horizontal (Maipita & Fitrawaty, 2014).

Ukuran terakhir yang sangat sederhana dan ringkas mengenai tingkat relatif ketimpangan pendapatan di sebuah negara dapat diperoleh dengan menghitung Indeks atau koefisien gini. Indeks gini merupakan sebuah ukuran numerik yang menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan secara keseluruhan. Nilainya berkisar antara 0 hingga 1, di mana 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang sepenuhnya merata, sementara 1 mencerminkan ketimpangan pendapatan yang sangat ekstrem (Todaro & Smith, 2020). Indeks gini didapatkan dengan menghitung luas daerah diantara garis diagonal yang merupakan garis pemerataan sempurna dengan kurva lorenz dan kemudian di bandingkan dengan luas total dari setengah bujur sangkar dimana terdapatnya kurva lorenz (Arsyad, 2010).

Adapun rumus umum koefisien Gini atau Gini Rasio adalah sebagai berikut (Badan Pusat Statistik, 2009).

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n f p_i * (F c_i + F c_{i-1})$$

Keterangan:

GR = Koefisien Gini (Gini Rasio)

$f p_i$ = Frekuensi penduduk pada kelas pengeluaran ke- i

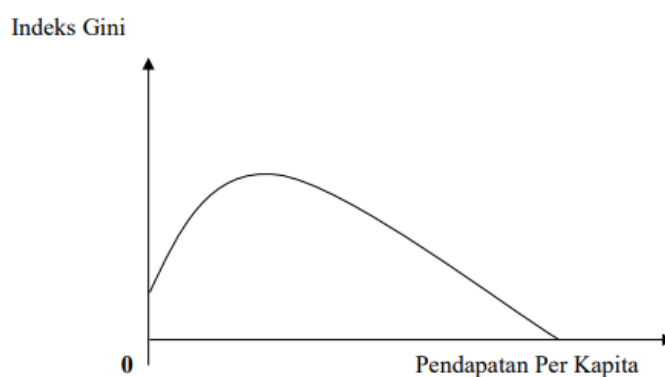
$F c_i$ = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke- i

$F c_{i-1}$ = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke ($i - 1$)

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi dan Hipotesis U-Terbalik Kuznet

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas suatu perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa secara keseluruhan dalam suatu periode tertentu, yang biasanya diukur berdasarkan perubahan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) riil dari tahun ke tahun (Todaro & Smith, 2020). Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kemajuan produktivitas suatu negara yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa indikator utama yang sering digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi meliputi PDB riil, yang mencerminkan total output barang dan jasa setelah disesuaikan dengan inflasi; Pendapatan Per Kapita, yang mengukur rata-rata pendapatan penduduk; serta laju investasi dan tingkat konsumsi, yang menggambarkan aktivitas ekonomi di suatu negara.

Hipotesis U Terbalik Kuznets diperkenalkan oleh Simon Kuznets pada tahun 1955. Hipotesis ini menjelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi (diukur dengan PDB per kapita) dan ketimpangan pendapatan dalam sebuah masyarakat. Secara grafis, hubungan ini digambarkan sebagai kurva berbentuk huruf U terbalik. Artinya, pada tahap awal pembangunan, ketimpangan pendapatan meningkat, tetapi setelah mencapai titik tertentu (titik puncak), ketimpangan tersebut mulai menurun (Kuznets, 1955 & Todaro & Smith, 2020).



Sumber: Todaro & Smith (2020).

Gambar 2.2 Kurva Kuznet

Ketimpangan pendapatan awalnya meningkat pada tahap awal pembangunan ekonomi karena pergeseran dari sektor agraris berpenghasilan rendah ke sektor industri yang lebih produktif. Pada tahap ini, hanya sebagian kecil populasi yang

dapat menikmati keuntungan dari perubahan tersebut, sementara sebagian besar penduduk tetap berada di sektor tradisional. Ketimpangan mencapai puncaknya di tahap menengah, ketika sektor industri semakin mendominasi, tetapi sebagian besar penduduk belum sepenuhnya beradaptasi. Namun, seiring dengan berjalannya waktu dan meningkatnya pembangunan, ketimpangan mulai menurun pada tahap lanjut. Penurunan ini disebabkan oleh investasi sosial, seperti pendidikan dan kesehatan, redistribusi pendapatan melalui kebijakan pemerintah, serta pertumbuhan sektor jasa yang lebih merata.

2.1.5 Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau yang dikenal dengan *fintech peer-to-peer (P2P) lending* diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016. Layanan ini didefinisikan sebagai penyelenggaraan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman secara langsung melalui sistem elektronik berbasis internet dalam mata uang rupiah. Penyelenggara layanan *fintech P2P lending* dapat berbentuk perseroan terbatas (PT) atau koperasi, dan harus terdaftar serta diawasi oleh OJK. Penyelenggara *P2P lending* wajib memberikan masukan tentang kewajaran suku bunga berdasarkan kondisi ekonomi nasional.

Fintech peer-to-peer (P2P) lending ditujukan untuk mendukung pertumbuhan alternatif pembiayaan untuk masyarakat, terutama bagi yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal. Sumber dana *P2P lending* berasal langsung dari pemberi pinjaman (*lender*) dan dialokasikan kepada penerima pinjaman (*borrower*). Batasan pemberian pinjaman dari layanan *P2P lending* adalah Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) per penerima pinjaman mengindikasikan bahwa layanan ini dapat mendorong aktivitas produktif seperti pengembangan usaha kecil dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Berdasarkan peruntukannya, *fintech P2P Lending* berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan. Inklusi keuangan didefinisikan sebagai kondisi di mana individu dan pelaku usaha memiliki akses ke produk dan layanan keuangan formal yang efektif, terjangkau, dan sesuai kebutuhan mereka (World Bank, 2014). Akses ke layanan keuangan, seperti pinjaman, rekening bank, atau asuransi,

merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. *P2P lending*, sebagai bagian dari inovasi keuangan berbasis teknologi, memiliki peran penting dalam mendukung inklusi keuangan di Indonesia. Dengan menjangkau masyarakat di daerah terpencil dan kelompok yang tidak memiliki agunan atau riwayat kredit, *P2P lending* mengatasi hambatan-hambatan struktural yang menghalangi mereka untuk memanfaatkan layanan keuangan formal. Semakin banyak masyarakat yang terinklusi secara keuangan, semakin besar peluang untuk meningkatkan pendapatan mereka, yang pada akhirnya mengurangi ketimpangan pendapatan.

P2P lending memperkuat distribusi kredit dengan menghilangkan hambatan tradisional, seperti persyaratan agunan yang ketat dan birokrasi yang panjang. Dengan menggunakan teknologi digital, proses pengajuan pinjaman menjadi lebih cepat dan transparan, sehingga pemberi pinjaman dapat menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya dianggap berisiko tinggi. Dampaknya, masyarakat berpenghasilan rendah dapat mengakses pembiayaan yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi mereka. Pembiayaan melalui *P2P lending* juga mengurangi ketergantungan masyarakat pada kredit informal yang sering kali membebankan bunga yang sangat tinggi. Dengan bunga yang lebih wajar dan transparan, penerima pinjaman dapat memanfaatkan pembiayaan secara lebih produktif, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap distribusi pendapatan.

Dengan menyediakan akses kredit kepada masyarakat yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal, *P2P lending* mampu meningkatkan pendapatan kelompok berpenghasilan rendah dan mempercepat pengurangan kesenjangan ekonomi. Regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan memberikan landasan yang kuat bagi penyelenggaraan layanan ini secara adil, transparan, dan berkelanjutan, sehingga semakin memperkuat perannya dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif di Indonesia.

2.1.6 Pengangguran dan Distribusi Pendapatan

Pengangguran merupakan kondisi ketika sebagian angkatan kerja tidak terserap dalam pasar tenaga kerja, sehingga tidak memperoleh pendapatan dari kegiatan ekonomi. Dalam kerangka makroekonomi, pengangguran tidak hanya dipandang

sebagai masalah efisiensi ekonomi, tetapi juga berdampak langsung terhadap distribusi pendapatan. Ketika pengangguran tinggi, proporsi masyarakat yang tidak memiliki penghasilan meningkat, sementara kelompok yang tetap bekerja atau memiliki modal terus memperoleh pendapatan. Ketimpangan pun cenderung membesar.

Dalam konteks teori distribusi pendapatan fungsional, pendapatan nasional dibagi kepada pemilik faktor produksi: tenaga kerja memperoleh upah, pemilik modal memperoleh laba, dan pemilik tanah memperoleh sewa (Mankiw, 2019). Ketika tingkat pengangguran meningkat, maka bagian pendapatan yang mengalir ke tenaga kerja (*wage share*) akan menyusut. Sebaliknya, pemilik modal tetap memperoleh imbal hasilnya. Hal ini menyebabkan distribusi pendapatan menjadi tidak seimbang karena kelompok pekerja tidak mendapatkan bagian yang proporsional dari output ekonomi.

Selanjutnya, teori Keynesian memandang pengangguran sebagai konsekuensi dari kekurangan permintaan agregat. Menurut Keynes, dalam kondisi resesi atau stagnasi ekonomi, permintaan terhadap barang dan jasa menurun, yang menyebabkan perusahaan mengurangi produksi dan memutus hubungan kerja. Akibatnya, daya beli masyarakat, terutama dari kalangan pekerja, menurun drastis. Ketika sebagian besar penduduk kehilangan pendapatan karena pengangguran, sementara kelompok berpenghasilan tinggi tetap memperoleh penghasilan dari investasi, dividen, atau laba usaha, maka jurang ketimpangan semakin melebar. Dalam pandangan Keynesian, intervensi pemerintah seperti belanja publik dan kebijakan tenaga kerja menjadi penting untuk menurunkan pengangguran dan mendorong pemerataan pendapatan.

Doeringer et al., (1972) dalam teori dualisme pasar tenaga kerja membagi pasar tenaga kerja menjadi dua segmen utama:

1. Pasar utama—berisi pekerjaan formal dengan upah tinggi, stabilitas kerja, dan mobilitas vertikal yang tinggi.
2. Pasar sekunder—berisi pekerjaan informal atau tidak stabil, dengan upah rendah, risiko tinggi, dan tanpa perlindungan sosial.

Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, sebagian besar angkatan kerja terkonsentrasi di pasar sekunder, dan sebagian lainnya bahkan mengalami pengangguran terbuka. Situasi ini menciptakan ketimpangan pendapatan struktural, karena hanya sebagian kecil populasi yang memperoleh manfaat ekonomi dari pekerjaan berkualitas tinggi, sementara sisanya tetap rentan terhadap fluktuasi pasar dan tidak memperoleh pendapatan yang layak.

Dengan demikian, berdasarkan teori distribusi pendapatan fungsional, teori Keynesian, dan teori dualisme pasar tenaga kerja, dapat disimpulkan bahwa pengangguran merupakan faktor penting yang memengaruhi ketimpangan pendapatan. Meningkatkan partisipasi tenaga kerja dalam sektor formal dan memperluas kesempatan kerja yang layak menjadi strategi utama dalam menciptakan distribusi pendapatan yang lebih adil dan berkelanjutan.

2.2 Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris mencakup hasil-hasil dari penelitian sebelumnya yang mengangkat konsep-konsep relevan dan berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian Demir et al. (2022) menunjukkan bahwa *fintech* berperan signifikan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan melalui peningkatan inklusi keuangan. Layanan berbasis ponsel mempermudah akses ke layanan keuangan formal, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil, dengan mengatasi hambatan seperti biaya tinggi dan persyaratan kompleks. *Fintech* meningkatkan kepemilikan rekening, tabungan formal, dan akses kredit, sehingga dapat mengurangi ketimpangan hingga 18–23%, terutama di wilayah dengan disparitas ekonomi tinggi. Penelitian ini menegaskan pentingnya *fintech* sebagai alat efektif untuk mendorong inklusi keuangan dan mengurangi ketimpangan pendapatan.

Menurut Zhang et al. (2018), *fintech* berperan signifikan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di China melalui peningkatan inklusi keuangan dan dorongan kewirausahaan, terutama di pedesaan. *Fintech* mempermudah akses layanan keuangan bagi populasi yang sebelumnya tidak terlayani, sehingga menyempitkan kesenjangan ekonomi antara perkotaan dan pedesaan. Setiap peningkatan satu unit indeks keuangan inklusif digital meningkatkan pendapatan

rumah tangga pedesaan hingga 5,5–5,8% dan peluang kewirausahaan hingga 4,6–4,8%. Kelompok berpendapatan rendah mendapat manfaat lebih besar, menjadikan *fintech* sebagai instrumen inklusif yang memperkuat pemberdayaan ekonomi dan mengurangi kesenjangan

Penelitian Adugna (2024) mengungkapkan bahwa *fintech* berperan signifikan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di 65 negara selama 2013–2019. Layanan digital seperti digital lending dan crowdfunding mempermudah akses pembiayaan bagi kelompok marjinal, termasuk individu berpendapatan rendah dan UKM, tanpa memerlukan agunan. Selain itu, *fintech* mendorong inklusi keuangan secara tidak langsung dengan memaksa lembaga keuangan tradisional meningkatkan efisiensi, menurunkan biaya, dan memperluas jangkauan layanan melalui persaingan dan kolaborasi. Dengan demikian, *fintech* membantu menjembatani kesenjangan keuangan dan memperluas akses ekonomi secara global.

Berikut ini adalah tabel yang merangkum penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi dasar bagi penelitian ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti / Judul / Tahun	Variabel / Metode	Hasil dan Kesimpulan
1	Ayse Demir/ Fintech, financial inclusion and income inequality: a quantile regression approach/ 2022	Indeks Gini, Fintech, Inklusi keuangan/ Regresi Kuantil	Penelitian ini menemukan bahwa Fintech secara signifikan mengurangi ketimpangan pendapatan, terutama melalui peningkatan inklusi keuangan.
2	Hailu Adugna/ Fintech Dividend: How Would Digital Financial Services Impact Income Inequality Across Countries/ 2024	Indeks Gini, Fintech Digital Lending, Fintech Digital Capital-Raising/ Regresi data panel	Layanan keuangan digital yang disediakan oleh Fintech, seperti pinjaman digital dan penggalangan modal digital, secara signifikan mengurangi ketimpangan pendapatan.
3	Xun Zhang, Jiajia Zhang & Zongyue He/ Is Fintech	Pendapatan rumah tangga, Indeks keuangan inklusif	Fintech membantu mengurangi kesenjangan pendapatan antara rumah tangga di pedesaan dan

	Inclusive? Evidence from China's Household Survey Data/ 2018	digital/ Regresi Data Panel	perkotaan, dengan memberikan akses layanan keuangan yang lebih inklusif.
4.	INDEF & Asosiasi Fintech Indonesia/ Studi Dampak Fintech <i>P2P Lending</i> terhadap Perekonomian Nasional "Fintech/ 2019	Perekonomian Indonesia (PDB, Indeks Gini, Angka Kemiskinan, Penyerapan Tenaga Kerja), Penyaluran dana Fintech <i>P2P Lending</i> , Investasi di sektor Fintech/ Input-Output (I-O)	Fintech mendukung inklusi keuangan dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Indeks Gini turun dari 0,382 menjadi 0,380.
5	Hindun, Ady Soejoto & Hariyati/ Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia	Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan/Regresi data panel	pendidikan dan kemiskinan berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, sedangkan pengangguran tidak berpengaruh.
6	Aufa Nadya & Syafri/ Pengaruh Faktor Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Pengangguran terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia/ 2019	Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Pengangguran/ Regresi data panel	Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh, pendidikan dan pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan.
7	Razi Rahman & Dewi Zaini Putri/ Analisis Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk dan Inflasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Provinsi di Pulau Sumatera/ 2021	Indeks Gini, Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk & Inflasi/ Regresi data panel	Pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan inflasi memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

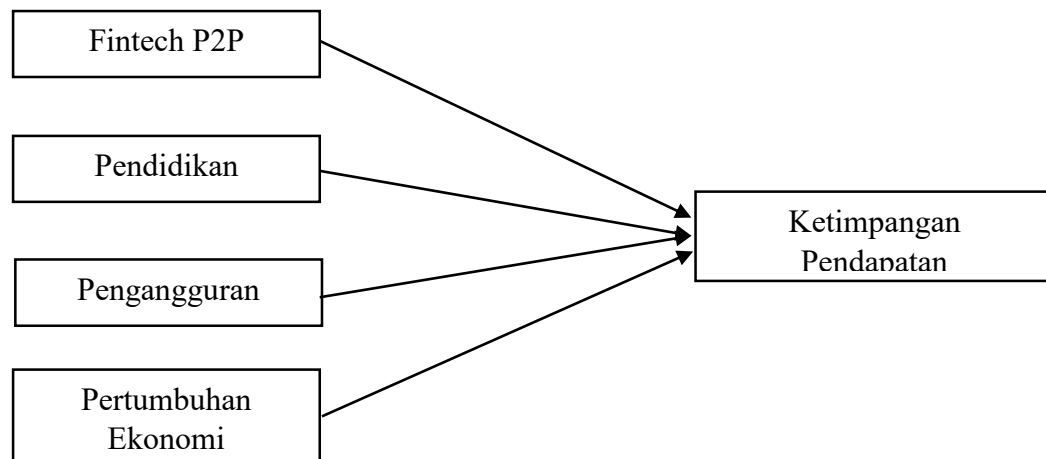
8	Muhammad Ibnu Fatsabit & Husna Leila /Pengaruh Keterbukaan Ekonomi, Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia/ 2019	Keterbukaan Ekonomi, Pendidikan, Dan Pengangguran/ Regresi data panel	Pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan pendidikan tidak berpengaruh signifikan. Keterbukaan ekspor berpengaruh positif signifikan dan keterbukaan impor tidak berpengaruh signifikan.
9	Kharisma Aghni Nuzul Firdhausy & Anifatul Hanim/ Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan/ 2023	Indeks gini, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, kemiskinan/ Regresi data panel	pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yang terjadi di provinsi jawa timur.
10	Rifki K. Musta'in & Jannatul Liutammima/ Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta / 2020	Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, desentralisasi Fiskal, Upah Minimum/ Regresi data panel	Tingkat pengangguran terbuka dan upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, sementara pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan distribusi pendapatan

Sumber: Peneliti Data diolah (2025)

2.3 Kerangka Berpikir

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu tantangan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Berdasarkan teori distribusi pendapatan neoklasik, ketimpangan terjadi ketika distribusi pendapatan dari faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal tidak merata (Mankiw, 2019). *P2P lending* berperan dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh lembaga formal, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan kelompok bawah (Sari & Saraswati, 2022).

Pendidikan, dalam kerangka teori human capital, merupakan kunci untuk meningkatkan keterampilan dan pendapatan individu. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar peluang memperoleh pekerjaan dengan upah yang layak, sehingga ketimpangan pendapatan dapat ditekan (Hindun et al., 2019). Sebaliknya, pengangguran memperlebar kesenjangan pendapatan karena sebagian masyarakat tidak memperoleh penghasilan. Pengangguran yang tinggi menurunkan bagian pendapatan dari tenaga kerja dan meningkatkan ketimpangan (Khoirudin & Musta'in, 2020). Pertumbuhan ekonomi berpotensi menurunkan ketimpangan pada tahap lanjut pembangunan, sebagaimana dijelaskan dalam hipotesis U terbalik Kuznets. Namun, pengaruhnya tergantung pada pemerataan hasil pertumbuhan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menganalisis pengaruh *P2P lending*, pendidikan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.



Gambar 2.3 Kerangka Berpikir

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap permasalahan penelitian yang harus diuji kebenarannya secara empiris. Berdasarkan kerangka berpikir di atas maka hipotesis penelitian ini adalah:

1. Diduga *P2P lending* memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia
2. Diduga Pendidikan memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia
3. Diduga Pengangguran memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia
4. Diduga Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia
5. Diduga *P2P Lending*, Pendidikan, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dimana memiliki tujuan yaitu untuk menjelaskan kejadian atau masalah dan dapat diselesaikan dengan menggunakan data yang sudah ada sebelumnya yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Data yang digunakan berupa data panel dari provinsi-provinsi di Indonesia selama periode 2020-2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber resmi. Sumber data dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini disajikan secara sistematis dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Data dan Sumber Data

Data	Satuan Pengukuran	Sumber Data	Simbol
Penyaluran Pinjaman <i>P2P Lending</i>	Miliar Rupiah	OJK	P2P
Rata-rata lama sekolah	Tahun	BPS	PDK
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	BPS	TPT
Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	BPS	PE
Ketimpangan Pendapatan	Angka Indeks	BPS	GINI

3.2 Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini melibatkan empat variabel independen dan satu variabel dependen. Adapun variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi *Fintech peer-to-peer lending* (P2P), Pendidikan (PDK), Pengangguran (TPT), dan Pertumbuhan Ekonomi (PE) sementara variabel terikat pada penelitian ini yaitu Ketimpangan Pendapatan (GINI) sehingga untuk memberikan batasan dalam penelitian ini menggunakan definisi operasional sebagai berikut.

3.2.1 Ketimpangan Pendapatan

Indikator ketimpangan pendapatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan angka indeks gini. Indeks Gini digunakan sebagai indikator untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1, di mana 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang merata (kesetaraan sempurna) dan 1 menunjukkan ketimpangan pendapatan yang ekstrem (ketimpangan sempurna). Dalam penelitian ini, variabel Indeks Gini diukur menggunakan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk periode 2020-2024 pada 34 provinsi di Indonesia.

3.2.2 *Peer-to-Peer Lending*

Dalam penelitian ini, variabel *Peer-to-Peer (P2P) Lending* diukur menggunakan total nilai pinjaman yang disalurkan melalui *platform P2P Lending*, yang dinyatakan dalam satuan miliar rupiah. Data terkait penyaluran pinjaman tersebut diperoleh dari laporan resmi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk periode 2020-2024 pada 34 provinsi di Indonesia.

3.2.3 Pendidikan

Dalam penelitian ini, variabel Pendidikan diukur menggunakan Rata-Rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas, yang dinyatakan dalam satuan tahun. Rata-rata lama sekolah mencerminkan jumlah tahun rata-rata yang telah ditempuh oleh penduduk usia produktif dalam mengikuti pendidikan formal. Data mengenai rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) untuk periode 2020-2024 pada 34 provinsi di Indonesia.

3.2.4 Pengangguran

Dalam penelitian ini, variabel Pengangguran diukur menggunakan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Data terkait tingkat pengangguran terbuka diperoleh dari laporan resmi Badan Pusat Statistik (BPS) untuk periode 2020-2024 pada 34 provinsi di Indonesia.

3.2.5 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan nilai total barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam periode tertentu, biasanya diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan ekonomi yang positif mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Pada penelitian ini, variabel pertumbuhan ekonomi diukur dalam persentase tingkat pertumbuhan PDB. Data mengenai pertumbuhan ekonomi diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) untuk periode 2020-2024 pada 34 provinsi di Indonesia.

3.3 Metode Analisis Data

3.4.1 Analisis Regresi Data Panel

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model regresi berganda dengan data panel yang diolah melalui aplikasi E-Views 12. Metode ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas, yaitu *peer-to-peer lending* (P2P), Pendidikan (PDK), Pengangguran (TPT), dan Pertumbuhan ekonomi (PE), terhadap variabel terikat, yaitu Indeks Gini (GINI) di 34 provinsi di Indonesia. Analisis Regresi Linier Berganda diterapkan untuk mempelajari hubungan pengaruh linear antara dua atau lebih variabel bebas (P2P, PDK, TPT, PE) dan satu variabel terikat (GINI). Persamaan regresi dengan data panel ditulis sebagai berikut:

$$GINI_{it} = \beta_0 + \beta_1 P2P_{it} + \beta_2 PDK_{it} + \beta_3 TPT_{it} + \beta_4 PE_{it} + \alpha_i + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

GINI = Indeks Gini

P2P = *Fintech Peer-To-Peer Lending*

PDK = Pendidikan

TPT = Pengangguran

PE = Pertumbuhan Ekonomi

β_0 = Konstanta

$\beta_1 - \beta_4$ = Koefisien regresi variable independen

α_i = efek tetap untuk masing-masing provinsi

ε_{it} = *error term*

i = Provinsi

t = Tahun

3.4.2 Pemilihan Model Data Panel

Analisis regresi data panel merupakan metode yang memanfaatkan kumpulan data (dataset) yang mencakup pengamatan terhadap perilaku unit *cross-section*, seperti individu, perusahaan, atau wilayah (negara/provinsi), selama periode waktu tertentu. Menurut Gujarati (2003), teknik data panel, yang menggabungkan data memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan pendekatan konvensional yang hanya menggunakan salah satu jenis data tersebut, antara lain::

1. Penggabungan data *time series* dan *cross-section* menghasilkan data yang lebih informatif, bervariasi, dengan tingkat kolinearitas antar variabel yang rendah, *degree of freedom* yang lebih besar, dan efisiensi yang lebih tinggi.
2. Data panel sangat cocok untuk menganalisis perubahan dinamis karena mengamati data *cross-section* dalam beberapa periode waktu.
3. Teknik ini dapat mendeteksi dan mengukur efek yang tidak teramati dalam data murni *time series* maupun *cross-section*.
4. Data panel memungkinkan penelitian terhadap model perilaku yang lebih kompleks.

Dalam analisis regresi data panel, terdapat tiga metode estimasi utama yang umum digunakan, yaitu *Common Effect*, *Fixed Effect*, *Random Effect*.

3.4.3 Common Effect Model (CEM)

Common Effect Model (CEM) adalah metode paling sederhana dalam analisis data panel, di mana data *time series* dan *cross-section* digabungkan tanpa mempertimbangkan perbedaan antar waktu dan individu. Estimasi model ini dapat dilakukan menggunakan metode OLS. Pendekatan ini mengabaikan dimensi waktu dan individu, dengan asumsi bahwa perilaku data antar individu bersifat seragam sepanjang waktu (Widarjono, 2018).

3.4.4 Fixed Effect Model (FEM)

Model *fixed effect* merupakan salah satu metode yang digunakan dalam estimasi data panel, yang bertujuan untuk menangkap perbedaan intersep antar unit *cross-section*, seperti perusahaan atau wilayah, dengan menggunakan variabel *dummy*. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap unit memiliki intersep yang

unik tetapi bersifat tetap (*time-invariant*) sepanjang periode pengamatan. Selain itu, model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi (*slope*) bersifat konstan, baik antar unit *cross-section* maupun antar waktu. Estimasi model *fixed effect* dilakukan dengan menerapkan teknik variabel dummy untuk mengidentifikasi perbedaan intersep antar unit. Pendekatan ini dikenal sebagai *Least Squares Dummy Variables* (LSDV) (Widarjono, 2018).

3.4.5 Random Effect Model (REM)

Model *random effect* adalah metode estimasi data panel yang mengasumsikan bahwa perbedaan intersep antar unit *cross-section* bersifat acak (*random*) dan tidak berkorelasi dengan variabel independen. Dalam pendekatan ini, intersep dianggap sebagai bagian dari *error term*, yang terdiri dari komponen gangguan spesifik unit dan gangguan acak umum. Model ini lebih efisien dibandingkan *fixed effect* apabila asumsi-asumsi dasarnya terpenuhi. Estimasi model *random effect* dilakukan menggunakan metode *Generalized Least Squares* (GLS), yang dirancang untuk mengatasi heteroskedastisitas dan korelasi antar *error term* (Widarjono, 2018).

3.4.6 Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk memilih antara *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Common Effect Model* (CEM) yang paling tepat untuk digunakan dalam estimasi data panel dengan membandingkan *residual sum of squares*. Hipotesis nol (H_0) menyatakan bahwa intersep sama *cross-section* untuk semua unit, sehingga model CEM lebih sesuai. Sebaliknya, hipotesis alternatif (H_1) menyatakan bahwa intersep berbeda antar unit *cross-section*, sehingga model FEM lebih tepat digunakan.

Penentuan apakah H_0 ditolak atau gagal ditolak dalam uji Chow dilakukan dengan membandingkan nilai F-hitung dengan F-kritis pada tingkat signifikansi tertentu (misalnya 5%). Jika F-hitung lebih besar dari F-kritis (atau $p\text{-value} < 0,05$), maka H_0 ditolak, yang berarti *model fixed effect* lebih sesuai. Sebaliknya, jika F-hitung lebih kecil dari F-kritis (atau $p\text{-value} \geq 0,05$), maka H_0 gagal ditolak, sehingga model *Common Effect* dianggap lebih tepat digunakan (Widarjono, 2018).

3.4.7 Uji Hausman

Uji Hausman adalah metode yang digunakan untuk memilih model yang paling sesuai antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM) dalam analisis data panel. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi antara *error* spesifik individu (*individual-specific error*) dengan variabel independen.

Hipotesis nolnya adalah Estimasi GLS (*random effect*) lebih efisien karena tidak ada korelasi antara *error* spesifik individu dan variabel independen. Sedangkan hipotesis alternatifnya adalah estimasi OLS (*fixed effect*) lebih konsisten karena terdapat korelasi antara *error* spesifik individu dan variabel independen. Jika nilai statistik Hausman (berbasis *chi-square*) signifikan pada tingkat kepercayaan tertentu (misalnya $p\text{-value} < 0,05$), maka H_0 ditolak, sehingga model *fixed effect* lebih tepat digunakan. Sebaliknya, jika H_0 gagal ditolak ($p\text{-value} \geq 0,05$), maka model *random effect* lebih sesuai (Widarjono, 2018).

3.4.8 Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk menentukan apakah model *Random Effect* (REM) lebih tepat dibandingkan model *Common Effect* (CEM) dalam analisis data panel. Uji ini bertujuan untuk menguji keberadaan *varians error* spesifik individu. Hipotesis nol (H_0) dalam uji ini adalah bahwa *varians error* spesifik individu sama dengan nol, yang berarti model *Common Effect* lebih sesuai. Sebaliknya, hipotesis alternatif (H_a) menyatakan bahwa *varians error* spesifik individu tidak sama dengan nol, sehingga model *Random Effect* lebih sesuai (Gujarati & Porter, 2009).

Statistik uji LM dihitung berdasarkan residual dari metode OLS dan mengikuti distribusi *chi-square*. Nilai statistik LM ini kemudian dibandingkan dengan nilai kritis *chi-square* pada tingkat signifikansi tertentu, seperti 5%. Jika nilai LM lebih besar dari nilai kritis *chi-square*, maka hipotesis nol ditolak, yang menunjukkan bahwa model *random effect* lebih tepat digunakan. Sebaliknya, jika nilai LM lebih kecil dari nilai kritis *chi-square*, maka hipotesis nol gagal ditolak, dan model *common effect* dianggap lebih sesuai.

3.5 Uji Asumsi Klasik

3.5.1 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi berfungsi sebagai pendeteksi adanya korelasi antara residual pada suatu periode tertentu dengan residual pada periode lainnya metode Breusch-Godfrey yang dilakukan secara manual dilakukan untuk mendeteksi adanya masalah autokorelasi dengan cara melakukan regresi residual yang didapat dari persamaan analisis terhadap variabel bebas dan lag dari residual yang diperoleh dari penelitian guna mendapat nilai *R-squared* yang lalu dikali dengan jumlah observasi (Widarjono, 2018), dengan hipotesis berikut:

H_0 : Tidak terdapat autokorelasi hingga orde ke-m ($\rho_1 = \rho_2 = \dots = \rho_p = 0$).

H_1 : Terdapat autokorelasi hingga orde ke-m ($\rho_1 \neq \rho_2 \neq \dots \neq \rho_p \neq 0$)

3.5.2 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini dilakukan untuk menentukan apakah terdapat kesalahan atau penyimpangan dari asumsi homoskedastisitas, di mana varians *error* term diharapkan serupa atau konstan untuk setiap kombinasi variabel. Jika terjadi pelanggaran asumsi ini, metode OLS tidak lagi bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan metode White, yang memiliki hipotesis berikut:

H_0 : tidak terdapat heteroskedastisitas (varian residual konstan)

H_a : terdapat heteroskedastisitas (varian residual tidak konstan)

3.5.3 Uji Normalitas

Pengujian ini bertujuan untuk menentukan apakah residual memiliki distribusi normal, atau bias dikatakan, untuk mengevaluasi apakah data residual tersebar secara normal. Metode yang digunakan adalah Jarque-Bera test (JB test) dan metode grafis. Dalam JB test, distribusi normal dievaluasi berdasarkan nilai skewness dan kurtosis.

Sehingga hipotesis yang muncul adalah H_0 yang berarti data residu tersebar normal dan H_a data tersebar tidak normal.

Kriteria pengujian JB test:

Jika nilai JB test $>$ nilai kritis *Chi-square*, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Jika nilai JB test $<$ nilai kritis *Chi-square*, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

3.5.4 Deteksi Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk menentukan apakah terdapat hubungan linear antar variabel independen. Hanya dengan regresi berganda dapat dilakukan uji multikolinearitas. Masalah multikolinearitas terjadi pada model regresi saat sejumlah/semua variabel bebas hubungannya linier sempurna. Masalah multikolinieritas dapat dideteksi menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) (Widarjono, 2018).

3.6 Pengujian Hipotesis

3.6.1 Uji t-statistik (Uji Parsial)

Pengujian ini bertujuan untuk mengevaluasi signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Penelitian ini menerapkan uji satu arah dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 5%, dengan perumusan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 1:

$H_0 : \beta_1 = 0$ (*Peer-to-Peer Lending* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Indeks Gini).

$H_a : \beta_1 < 0$ (*Peer-to-Peer Lending* memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Gini).

Hipotesis 2:

$H_0 : \beta_2 = 0$ ((Pendidikan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Indeks Gini).

$H_a : \beta_2 < 0$ (Pendidikan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Gini).

Hipotesis 3:

$H_0 : \beta_3 = 0$ (Pengangguran tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Indeks Gini).

$H_a : \beta_3 > 0$ (Pengangguran memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Indeks Gini).

Hipotesis 4:

$H_0 : \beta_4 = 0$ (Pertumbuhan Ekonomi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Indeks Gini).

$H_a : \beta_4 < 0$ (Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Gini).

Apabila hasil uji menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel independen secara parsial lebih besar dari tingkat signifikansi α (5%), maka H_0 tidak ditolak, yang mengindikasikan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih kecil dari α (5%), maka H_1 diterima, yang berarti variabel independen secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.6.2 Uji F-statistik

Uji F-statistik digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen dalam sebuah model regresi. Semakin besar nilai F-hitung, semakin baik model tersebut dibandingkan dengan nilai F-hitung yang kecil, karena menunjukkan bahwa variabel independen memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai probabilitas (F-statistik) menunjukkan tingkat signifikansi marginal dari F-hitung, yang digunakan untuk menentukan apakah hasil uji signifikan secara statistik.

Hipotesis pengujian:

Hipotesis nol (H_0): $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$, yang berarti bahwa semua variabel independen secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Hipotesis alternatif (H_a): Setidaknya ada satu $\beta_i \neq 0$, yang berarti bahwa variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Keputusan pengujian dibuat berdasarkan perbandingan nilai F-hitung dengan F-tabel atau berdasarkan nilai probabilitas (p-value). Jika F-hitung lebih besar dari F-tabel, atau jika nilai probabilitas lebih kecil atau sama dengan tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika F-hitung lebih kecil atau sama dengan F-tabel, atau jika nilai probabilitas lebih besar dari α maka H_0 tidak ditolak, yang berarti variabel independen secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.7 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada dasarnya mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menjelaskan variabilitas variabel dependen. Nilai R^2 berkisar antara 0 hingga 1. Nilai R^2 yang rendah menunjukkan bahwa variabel independen hanya mampu menjelaskan sebagian kecil variasi pada variabel dependen. Sebaliknya, nilai R^2 yang mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel independen hampir sepenuhnya mampu memberikan informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi pada variabel dependen (Widarjono, 2018).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh *Peer-to-Peer (P2P) Lending*, Pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia pada periode 2020–2024, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. *P2P Lending* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa peningkatan penyaluran pinjaman melalui platform *P2P Lending* berkontribusi dalam menurunkan ketimpangan pendapatan dengan memperluas akses keuangan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
2. Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah penduduk, maka ketimpangan pendapatan akan semakin menurun. Pendidikan menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing masyarakat.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya, kenaikan tingkat pengangguran justru menurunkan ketimpangan pendapatan. Hal ini dapat dijelaskan melalui struktur dualisme pasar tenaga kerja di Indonesia, di mana kenaikan pengangguran menyebabkan homogenisasi pendapatan di tingkat bawah akibat dominasi sektor informal, sehingga secara statistik ketimpangan pendapatan tampak berkurang.

4. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Walaupun arah pengaruhnya positif, pertumbuhan ekonomi dalam periode penelitian ini tidak cukup kuat secara statistik untuk mempengaruhi perubahan ketimpangan pendapatan di Indonesia.
5. Secara bersama-sama, keempat variabel bebas yaitu *P2P Lending*, Pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Dengan koefisien determinasi (R^2) sebesar 97,07%, model ini mampu menjelaskan sebagian besar variasi ketimpangan pendapatan selama periode penelitian.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu mendorong perluasan dan pemerataan akses layanan *P2P Lending* ke seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah pedesaan dan wilayah tertinggal. Selain itu, diperlukan regulasi yang mengarahkan penyaluran kredit *P2P Lending* ke sektor-sektor produktif, seperti UMKM, pertanian, dan industri kreatif, guna memastikan bahwa pembiayaan digital benar-benar mendukung peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat. Dengan demikian, *P2P Lending* tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga mempercepat pemerataan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
2. Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan nasional. Upaya peningkatan rata-rata lama sekolah, terutama di wilayah dengan tingkat pendidikan rendah, diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia yang lebih produktif dan mempercepat pemerataan pendapatan antar lapisan masyarakat.

3. Strategi penurunan tingkat pengangguran perlu difokuskan pada penciptaan lapangan kerja produktif di sector formal tanpa melupakan pemberdayaan sektor informal. Program pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan pasar kerja lokal perlu diperluas untuk meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi homogenisasi pendapatan di kelompok bawah.
4. Pemerintah perlu mengarahkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, dengan memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, melainkan juga menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Program pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan UMKM, dan pembangunan infrastruktur digital dapat menjadi langkah konkret untuk mencapai pertumbuhan yang lebih merata.
5. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukkan variabel lain yang dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan, seperti tingkat literasi keuangan, tingkat digitalisasi, tingkat urbanisasi, atau struktur sektor informal, serta mempertimbangkan metode analisis lain yang dapat menangkap hubungan dinamis antar variabel, seperti model data panel dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adugna, H. (2024). Fintech dividend: How would digital financial services impact income inequality across countries? *Technology in Society*, 77, 1–36. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2024.102485>
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan* (Edisi Kelima). UPP STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik. (2009). *Analisis Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Distribusi Pendapatan*. diakses melalui: <https://www.bps.go.id/id/publication/2009/03/04/bfe286bb431babaad062642f/analisis-kemiskinan-ketenagakerjaan-dan-distribusi-pendapatan.html> .
- Bank Indonesia. (2020a). *Keuangan Inklusif*. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/keuangan-inklusif/default.aspx>
- Bank Indonesia. (2020b). *Tentang BI*. <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/Default.aspx>
- Becker, G. S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education* (3rd ed). University of Chicago Press.
- Demir, A., Pesqué-Cela, V., Altunbas, Y., & Murinde, V. (2022). Fintech, financial inclusion and income inequality: a quantile regression approach. *European Journal of Finance*, 28(1), 86–107. <https://doi.org/10.1080/1351847X.2020.1772335>
- Doeringer, P. B., Stoikov, J., & Piore, M. J. (1972). Internal Labor Markets and Manpower Analysis. *Industrial and Labor Relations Review*, 25(2), 273. <https://doi.org/10.2307/2521766>
- Dwiputra, R. M. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia (*Periode 2011-2016*). Jurnal Ilmiah. Universitas Brawijaya Malang.
- Firdhausy, K. A. N., Hanim, A., & Komariyah, S. (2023). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Ketimpangan Pendapatan Dan Kemiskinan Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekuilibrium*, VII(1), 35–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/jek.v7i1.33216> 35
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (5th ed). McGraw-Hill.

- Hindun, H., Soejoto, A., & Hariyati, H. (2019). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 8(3), 250. <https://doi.org/10.26418/jebik.v8i3.34721>
- INDEF, & Asosiasi Fintech Indonesia. (2019). Studi Dampak Fintech P2P Lending terhadap Perekonomian Nasional. *Institute for Development of Economics and Finance*, 1–13. <https://indef.or.id/update/detail/studi-dampak-fintech-peer-to-peer-lending-terhadap-perekonomian-nasional>
- Jacob A. Mincer. (1974). The Human Capital Earnings Function. *National Bureau of Economic Research*, 1(1), 303–335.
- Khoirudin, R., & Musta'in, J. L. (2020). Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Tirtayasa Ekonomika*, 15(1), 17. <https://doi.org/10.35448/jte.v15i1.6407>
- Kuncoro, M. (2009). *Ekonomi pembangunan: teori, masalah, dan kebijakan*. UPP STIM YKPN.
- Kuznets, S. (1955). Economic Growth And Income Inequality. *The American Economic Review*, 45(1), 1–28.
- Maipita, I., & Fitrawaty. (2014). *Mengukur Kemiskinan & Distribusi Pendapatan*. UPP STIM YKPN.
- Mankiw, N. G. (2019). *Macroeconomics* (10th ed.). Worth Publishers.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Otoritas Jasa Keuangan, 1–29. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL - POJK Fintech.pdf>
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017. (2017). Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Bank Indonesia, 1. <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/fintech/Contents/default.aspx>
- Psacharopoulos, G., & Patrinos. (2004). Returns to investment in education: A further update. *Education Economics*, 12(2), 111–134.
- Psacharopoulos, G., & Patrinos, H. A. (2004). Returns to Investment in Education: A Further Update. *Education*, 12(September), 111–134. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0964529042000239140>
- Sari, R. A., & Saraswati, B. D. (2022). Analisis Pengaruh Fintech P2p Lending Dan Kredit Bank Umum Terhadap Ketimpangan Pendapatan. *Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat Volume*, 1, 16–36. <https://doi.org/https://10.24246/dekat.v1i1.4718> Penerbit:
- Solow, R. M. . (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65–94.

- Sukirno, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Kencana (Prenada Media).
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development*. Thirteenth Edition. Pearson.
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya* (5th ed.). UPP-STIM YKPN.
- Zhang, X., J.Zhang, A. H. (2018). Is Fintech Inclusive ? Evidence from China ' s Household Survey Data Xun Zhang (Beijing Normal University).